

Ikhtisar Seminar  
**Meniti Jalan Menuju  
Transformasi Ekonomi Hijau  
di Indonesia**



## Seminar Meniti Jalan Menuju Transformasi Ekonomi Hijau di Indonesia

Senin, 23 Oktober 2023 | 12.00 – 15.00 WIB

### Temuan Riset Inovasi Ekonomi Hijau dalam Indonesia Emas 2045

Rionanda D. Putra (Analisis Ekonomi Politik LAB 45)

Pertumbuhan ekonomi seharusnya berjalan seiring dengan penurunan emisi karbon. Dalam hal ini, diskursus ekonomi hijau sudah sepatutnya tidak hanya dikemas oleh romantisme—seperti “cinta alam”—tetapi juga seputar uang. Dilihat dari perkembangan ekonomi hijau, Indonesia nyatanya baru memanfaatkan sebagian kecil dari potensi EBT yang ada, yakni 12,3% dari produksi energi Indonesia dan 16% dari konsumsi energi Indonesia. Selain itu, Green Growth Index 2021 dan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat *trade-off* antara ekonomi dengan lingkungan.

Perkembangan ekonomi hijau di Indonesia tidak terlepas dari tantangan besar yang masih dihadapi. Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia, yakni regulasi, kelembagaan, dan pendanaan. Regulasi di Indonesia belum menaikkan daya tawar ekonomi hijau dan mencerminkan komitmen politik pemerintah, serta masih merefleksikan ketidakpastian hukum. Sementara itu, tantangan kedua merujuk pada *silo problem* dan kepentingan yang berlawanan antar K/L, peran aktif K/L yang terpusat pada beberapa instansi, dan kurangnya integrasi antar *stakeholder*. Pendanaan ekonomi hijau di Indonesia pun masih berada di bawah bayang-bayang minimnya transparansi transisi energi sehingga membuat kepercayaan publik rendah, serta masalah keterbatasan SDM.

Dengan tantangan di atas, dalam perencanaan skenario ekonomi hijau, Indonesia sejatinya masih berada pada kondisi pendanaan tidak optimal serta regulasi dan kelembagaan tidak efektif. Dalam kondisi ini, beberapa hal yang terjadi adalah ekologi hijau terancam, ekonomi hijau stagnan, relasi antara pemerintah dan pelaku usaha lemah dan diikuti oleh lemahnya organisasi masyarakat sipil. Indonesia perlu bergerak ke kondisi pendanaan tidak optimal serta regulasi dan kelembagaan efektif, hingga pada akhirnya ke kondisi ideal, yakni pendanaan optimal, regulasi dan kelembagaan efektif. Dalam kondisi ideal tersebut, ekologi hijau akan terjaga, ekonomi hijau tumbuh, relasi pemerintah dan pelaku usaha pun kuat diimbangi dengan kuatnya organisasi masyarakat sipil.

Salah satu upaya transisi energi yang efektif dapat dilihat dari dampak ekonomi *Pumped Storage*. Pada esensinya, *Pumped Hydro Energy Storage* (PHES) merupakan baterai besar yang menyimpan hasil listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Efektivitasnya dalam transisi energi datang dari *coefficient multiplier*-nya, yakni nilai ekonomi

yang tercipta dari interaksi antarsektor. Dengan investasi *Pumped Storage* 37 GW senilai Rp390 triliun rupiah, beberapa dampak ekonomi yang hadir ialah: (1) membuka 2,65 juta lapangan kerja baru; (2) mendorong nilai tambah ekonomi kita Rp325 triliun; (3) menambah PDB sebesar Rp699 triliun; serta (4) mendorong penerimaan pajak sebesar Rp27 triliun.

Sebagai kesimpulan, perkembangan ekonomi hijau di Indonesia masih tertinggal dari target yang ditentukan (23% EBT pada tahun 2025) karena tantangan regulasi (ketidakpastian hukum yang tumpang tindih), kelembagaan (koordinasi antar K/L yang kurang), dan pendanaan (alokasi yang berkompetisi dan transparansi yang rendah). Adapun berapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) pembentukan Satgas Ekonomi Hijau; (2) penataan kembali sektor-sektor prioritas; (3) pengalihan subsidi BBM menuju mobilitas massal; (4) menentukan megaprojek ekonomi hijau yang spesifik; dan (5) regulasi penyokong inkubasi riset ekonomi hijau dan pembentukan SDM sektor hijau (seperti *green auditing*).

### **Green Economy: Tantangan dan Harapan**

Sukma Lesmana (Direktur Career Development and Alumni Center UMSU)

Saat ini, pertumbuhan ekonomi masih diiringi dengan dampak lingkungan dan pada akhirnya menimbulkan ketiadaan keadilan sosial (*brown economy*), bahkan ketika sudah ada Paris Agreement yang menggantikan kegagalan Kyoto Protocol. Melihat sejarah, terdapat beberapa tonggak dalam perkembangan *green economy*, seperti:

- i. 1989: usulan sekelompok peneliti Inggris "Blueprint for a *green economy*"
- ii. 1991-1993: laporan "Blueprint 2: Greening the world economy" dan "Blueprint 3: Measuring Sustainable Development"
- iii. 2008: UNEP menginisiasi *green economy initiatives*
- iv. 2009: UNEP menginisiasi gagasan *green stimulus* melalui laporan "Global Green New Deal (GGND)"
- v. 2019: The UN High Level Forum on Sustainable Development di New York menetapkan 5 prinsip *green economy*

*Green economy* sendiri merupakan prinsip ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Beberapa upaya dan dalam *green economy* mencakup penurunan emisi karbon, penghematan sumber daya, berbasis pembangunan berkelanjutan, berkeadilan sosial, dan penggunaan energi yang terbarukan. *Green economy* juga memiliki tiga pilar, yakni sosial, lingkungan dan ekonomi. Hubungan sosial dengan lingkungan harus bersifat *bearable* (layak), sosial dengan ekonomi bersifat *equitable* (berkeadilan), serta ekonomi dengan lingkungan

bersifat *viable* (menggantikan kerusakan yang terjadi). Untuk mengukur *green economy*, terdapat beberapa indeks yang dapat digunakan, seperti Green Economy Index oleh Bappenas dan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh PBB, di mana Indonesia saat ini menduduki posisi 75 dalam pencapaiannya di antara negara-negara di dunia. *Green economy* memang tidak akan bisa dilepaskan dengan SDGs karena menyangkut *low carbon growth*, *resource efficiency*, dan *social inclusivity*.

Penerapan *green economy* pada kenyataannya dipenuhi peluang sekaligus tantangan. Saat ini, Indonesia telah memiliki Rancangan Pembangunan Rendah Karbon dan Nusantara Investment Authority (NIA) yang fokus pada investasi dengan syarat pengendalian lingkungan. Selain itu, terdapat pula potensi dana pengendalian perubahan iklim bagi Indonesia dari Norwegia dan Green Climate Fund serta belanja iklim di dalam APBN – meskipun belum efektif. World Resources Institute (WRI) sempat pula mengupayakan Project Potico; memanfaatkan lahan terdegradasi untuk sawit dan perkebunan sawit dijadikan hutan. Proyek ini gagal karena kompleksitas aspek yang perlu dilihat (identifikasi lahan terdegradasi, melibatkan komunitas lokal, analisis hukum, manajemen hutan, pengawasan hutan). Peluang dan tantangan lainnya adalah perdagangan karbon, yakni jual beli kredit karbon atau sertifikat hak menambah emisi karbon karena ada sebagian pihak yang bisa menekan emisinya. Indonesia akan diuntungkan melalui skema *carbon trading* apabila dapat mempertahankan hutan. Dari segi biaya dan investasi, keuntungan atau *return* sumber daya energi terbarukan memang tidak bisa didapat dengan cepat. Meskipun begitu, *circular economy* maupun *digital circular economy*, yakni daur ulang, perlu diterapkan dan menjadi budaya kerja di perusahaan-perusahaan yang lebih mikro.

Upaya penerapan *green economy* dapat dilakukan dari hal yang paling dekat, dimulai dari individu maupun perguruan tinggi. Sebagai upaya individual, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: (1) menghindari penggunaan plastik sekali pakai; (2) *recycle*, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, (3) mengurangi sampah makanan; (4) mengurangi makan daging; (5) hemat sumber daya, seperti listrik dan air; serta (6) menggunakan transportasi publik. Selain itu, *green jobs*, yaitu pekerjaan terkait pembangunan berkelanjutan, rendah emisi, berbasis lingkungan, sangat berpotensi di masa depan. Contoh *green jobs* adalah *Ecopreneur*, *Eco Design Architect*, *Eco Fashionpreneur*, *Electric Car Technician*, *Energy Startup*, *Organic Foodpreneur*, *Solar Panel Technician*, *Urban Farmer*, *Waste Management Startup*, *Green Accounting* (transaksi untuk *green economy* harus dicatat sehingga perlu memahami tentang penurunan emisi dan biaya-biaya yang dihasilkan). Perguruan tinggi pun dapat menerapkan langkah konkret untuk mendukung *green economy*, seperti: (1) mengembangkan profil lulusan yang dapat menghadapi tantangan *green economy*; (2)

mengembangkan kurikulum yang beradaptasi dengan kebutuhan *green jobs*; (3) mendorong penelitian-penelitian mengenai penerapan dan dampak “*green economy indicator*” baik secara ekonomi makro maupun ekonomi mikro; serta (4) menerapkan konsep *green economy* di kampus masing-masing.

## **Mendukung Transisi Ekonomi Hijau di Indonesia**

Nariswari Nurjaman (Curriculum and Mentor Advisor Think Policy)

Jika ingin memperbaiki sistem dari ekonomi coklat ke ekonomi hijau, kita perlu mengukur dengan lebih baik. Selama ini, ekonomi atau kesejahteraan negara diukur melalui seberapa banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi dan dikonsumsi negara tersebut (berkembang menjadi cara kita mengukur Produk Domestik Bruto). PDB cocok sebagai indikator ukuran ekonomi, tetapi berbahaya ketika digunakan untuk menggeneralisasi pertumbuhan karena *trade-off* mementingkan pertumbuhan jangka pendek (mengorbankan kondisi lingkungan di jangka panjang). Pertimbangan matriks pengukuran di luar PDB yang mencakup ukuran kemajuan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih luas (termasuk kekayaan komprehensif). Contohnya adalah Kebahagiaan Nasional Bruto di Bhutan.

Lantas, bagaimana perkembangan pengukuran ekonomi hijau di Indonesia? Tidak hanya barang dan jasa, Indonesia juga memiliki modal/kekayaan alam yang benar-benar berkontribusi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergantung pada peningkatan produktivitas serta pengelolaan aset alam yang berkelanjutan. Indonesia turut memiliki Sistem Terintegrasi Neraca Ekonomi Lingkungan (Sisnerling), yakni pendataan SDA di Indonesia dan bagaimana memanfaatkannya dengan lebih baik. Sisnerling diturunkan menjadi PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan. Namun, terdapat pula tantangan pengukuran ekonomi hijau melalui neraca ekonomi lingkungan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya untuk memastikan ketepatan dan pemrosesan data, pembagian peran dan kapasitas kelembagaan yang terfragmentasi, serta hambatan ideologis karena ketiadaan konsensus mengenai metodologi pengukuran. Sementara itu, peluang dan potensi yang hadir adalah memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk neraca ekonomi lingkungan, mempromosikan program peningkatan kapasitas (pemerintah maupun NGO), dan meningkatkan koordinasi antar bidang pemerintahan.

Dengan kondisi di atas, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat memulai dengan melihat Ekonomi Donat, yakni pandangan bahwa pertumbuhan harus punya pondasi sosial (*social foundation*) yang kuat dan tidak menabrak langit-langit ekologis (*ecological ceiling*). *Social foundation* yang dimaksud di antaranya adalah air, pangan, kesehatan, pendidikan, penghasilan dan pekerjaan, perumahan, energi, jejaring, keadilan sosial, suara politik,

kesetaraan gender, perdamaian dan keadilan. Sementara itu, *ecological ceiling* termasuk penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, pengasaman laut, polusi kimia, pemuatan nitrogen dan fosfor, pengambilan air tawar, konversi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi udara. Dalam buku Doughnut Economics karya Kate Raworth, terdapat tujuh hal konkret yang dapat diimplementasikan, yaitu: (1) *Change the goal*; (2) *See the big picture*; (3) *Nurture human nature*; (4) *Get savvy with systems*; (5) *Design to distribute*; (6) *Create to regenerate*; dan (7) *Be agnostic about growth*. Think Policy turut berkontribusi dengan menawarkan pendekatan berbeda, yakni mengatasi masalah antargenerasi dengan pendekatan adaptif berdasarkan bukti dan empati, serta berfokus pada SDM, proses, dan solusi. Think Policy melakukannya dengan: (1) mengkaji akar masalah; (2) melibatkan pemangku kepentingan yang relevan; dan (3) memobilisasi daya upaya dari pemangku kepentingan.

### Tanya Jawab

Pertanyaan pertama adalah “Bagaimana menanggapi ketidakpastian laba dan potensi investasi di sektor *Green economy* dan meningkatkan *awareness* individu di tengah kebijakan pemerintah yang belum ketat?” Menurut Sukma, ketika kepastian dan penegakan hukum hadir, orang akan berinvestasi. Sementara itu, Nariswari menjelaskan bahwa kebijakan publik akan berhasil dengan *political will*, *economic capacity* (mengaet mitra pembangunan, Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha), dan *technical feasibility*. Kemudian, mahasiswa bisa belajar dan membuat literatur serta mencoba magang di mitra pembangunan.

Pertanyaan kedua berkuat seputar upaya mengurangi banyaknya pihak-pihak yang masih tidak mengindahkan *green economy*. Bagi Nariswari, diperlukan advokasi dengan corong-corong yang besar. Di Indonesia, OJK sudah menerbitkan taksonomi hijau (klasifikasi industri hijau dan non-hijau), pemerintah juga sedang mengembangkan mekanisme untuk mendenda perusahaan yang mencemari lingkungan. Selain itu, perlu juga untuk memperkuat *monitoring*, evaluasi dan verifikasi, dan membentuk kerja sama internasional tidak hanya dengan negara maju, tetapi juga sesama negara berkembang. Sukma menambahkan perlunya untuk kembali melihat pentingnya kepastian hukum. Selanjutnya, menjawab mengenai sumber data emisi dari transportasi dan mobilitas, kedua pembicara menyebutkan laporan KLHK maupun SDGs Indonesia, BPS, dan data *real time* dari aktor non pemerintah seperti pada aplikasi nafas sebagai beberapa sumber kredibel.


Masuk ke pertanyaan keempat, yakni “Bagaimana cara sebagai individu berperan *break the cycle* ekonomi yang tidak hijau?” Nariswari menjawabnya dengan poin tentang akuntabilitas, yakni tanggung jawab tidak hanya di pembeli, produsen juga memikirkan daur ulang produk. Selain itu, perlu untuk mendorong pengelolaan sampah yang kontekstual

terhadap lokasi, misalnya pengelolaan di urban dan pesisir berbeda. Sukma menambahkan bahwa perlu kesadaran bahwa dunia memiliki sumber daya terbatas dan kebijakan yang sudah ada perlu diimplementasi dengan baik.

Pertanyaan kelima menyoal dukungan yang dapat dilakukan oleh sektor swasta untuk transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Menurut Sukma, sektor swasta memiliki CSR, tetapi perlu diukur dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Nariswari menambahkan bahwa peran swasta memang besar secara nasional (Peraturan Menteri KLHK No. 75 Tahun 2019 ttg Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, CSR) maupun internasional (Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha). Pertanyaan terakhir adalah “Bagaimana peran pendidikan, kesadaran masyarakat, dan inovasi teknologi dalam mempercepat transisi energi?” Nariswari memandang bahwa peran hal-hal tersebut sangat besar, terlebih pendidikan tidak hanya di dalam kelas. Dalam hal ini, pendidikan perlu diejawantahkan menjadi pengabdian. Sukma pun menambahkan bahwa *green economy* perlu dimasukkan ke dalam kurikulum. Sebagai kesimpulan dari moderator, *green economy* paling nyata diupayakan dimulai dari diri sendiri meskipun banyak aktor yang berperan dalam mewujudkan. Terakhir, pengetahuan juga harus dibagikan secara luas untuk mengajak menggalakkan *green economy*.



 Jl. Mabas Hankam No. T65,  
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.

 Senin, 23 Oktober  
2023

 +62811452045

 lab45@lab45.id

 www.lab45.id